

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang senantiasa hadir di tengah-tengah masyarakat, khususnya di negara-negara berkembang. Kemiskinan senantiasa menarik perhatian berbagai kalangan, baik para akademisi maupun para praktisi. Berbagai teori konsep dan pendekatan pun terus menerus dikembangkan untuk menyibak tirai dan misteri kemiskinan ini. Di Indonesia masalah kemiskinan merupakan masalah sosial yang senantiasa relevan untuk dikaji terus menerus. Ini bukan saja karena masalah kemiskinan telah ada sejak lama dan masih hadir ditengah-tengah kita saat ini, melainkan pula karena kini gejalanya semakin meningkat dan sejalan dengan krisis multidimensional yang masih dihadapi oleh bangsa Indonesia. Konsepsi kemiskinan yang bersifat multidimensional kiranya lebih tepat digunakan sebagai pisau analisis dalam mendefinisikan kemiskinan dan merumuskan kebijakan penanganan kemiskinan di Indonesia.

Pemerintah Indonesia merancang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan sejak tahun 2007 untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan pekerjaan. Melalui program PNPM mandiri pedesaan dapat dirumuskan kembali mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, melalui beberapa tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, hingga tahap pemantauan dan evaluasi. Melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin, dapat ditumbuh

kembangkan sehingga mereka bukan lagi sebagai objek melainkan sebagai subyek upaya penanggulangan kemiskinan.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan. Latar belakang adanya PNPM mandiri pedesaan merupakan pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang mulai ditetapkan pada tahun 1998. Jadi Program Pengembangan Kecamatan (PPK) ini berganti program menjadi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. PNPM Mandiri dikukuhkan secara resmi oleh Presiden RI pada tanggal 30 April 2007 di kota Palu, Sulawesi Tengah.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat ini dapat dikatakan sebagai program pemberdayaan masyarakat terbesar di tanah air. Dalam pelaksanaannya, program ini memusatkan kegiatan bagi masyarakat Indonesia paling miskin di wilayah pedesaan. Program ini menyediakan fasilitas pemberdayaan masyarakat atau kelembagaan lokal, pendampingan pelatihan, serta dana bantuan langsung untuk masyarakat. Pelaksanaan PNPM mandiri pedesaan berada di bawah binaan Direktorat Jendral pemberdayaan masyarakat dan Desa (PMD) Kementerian Dalam Negeri. Program ini didukung dengan pembiayaan yang berasal dari alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), alokasi anggaran pendapatan belanja daerah (APBD), dana pinjaman atau hibah luar negeri dari sejumlah lembaga pemberi bantuan di bawah koordinasi Bank Dunia.

Program PNPM Mandiri Pedesaan (PNPM MPd) juga memiliki prinsip-prinsip pokok yaitu bertumpu pada pembangunan manusia. Setiap kegiatan diarahkan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia seutuhnya, serta bersifat demokratis yakni setiap pengambilan keputusan pembangunan dilakukan secara

musyawarah dan mufakat dengan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat miskin.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM MPd) diimplementasikan di Desa Lewopulo sejak tahun 2013 dengan beberapa kegiatan sebagai berikut: pembangunan polindes, pembuatan jalan, pembuatan pagar di Sekolah Dasar Khatolik Lewopulo, pemberian insentif guru honor, pemberian pinjaman dana ekonomi bergulir, simpan pinjam perempuan, selain bantuan dana dan pembangunan fasilitas fisik, juga dilakukan beberapa kegiatan pemberdayaan berupa: pembentukan kelompok SPP, pelatihan pengurus-pengurus mulai dari TPK (tim pengelola keuangan), pengurus UPK (unit pengelola keuangan), KPMD (kader pemberdayaan masyarakat desa) serta bimbingan teknis kepada para kelompok sasaran yang dilakukan oleh tim fasilitator dari desa. Berbagai program ini menuju pada visi PNPM Mandiri yakni tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat pedesaan.

Diluncurkannya PNPM MPd di Desa Lewopulo karena kondisi infrastruktur atau fasilitas fisik sebelum dilaksanakannya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan dinyatakan kurang memadai yakni: 1) masih kurangnya pembangunan jalan setapak disetiap gang, sehingga memperlambat transportasi bagi masyarakat, 2) minimnya fasilitas kesehatan, 3) minimnya fasilitas Pendidikan seperti ruang kelas. Selain itu, kondisi perekonomian warga Desa Lewopulo memiliki pendapatan yang berdeda-beda. Perbedaan pola konsumsi mereka dikarenakan jumlah pendapatan, jumlah tanggungan keluarga, dan pendidikan yang berbeda-beda.

Program yang dijalankan melalui PNPM ini sangat berdampak pada masyarakat. Pihak-pihak masyarakat desa Lewopulo yang menerima dana PNPM

itu adalah pihak kesehatan dan masyarakat khususnya perempuan. Upaya pemberdayaan dibidang kesehatan untuk pembuatan polindes dan pengadaan sarana prasarana kesehatan, sedangkan untuk pihak perempuan dana SPP. Dana SPP ini biasanya digunakan untuk membuka usaha contohnya seperti usaha tenun.

Dalam pelaksanaan program PNPM MPd di Desa Lewopulo ada beberapa hal yang terjadi, antara lain: 1) kurang adanya koordinasi yang baik antara pelaksana di lapangan, hal ini disebabkan pergantian waktu antara para fasilitator yang bertugas sehingga perlu adanya pembekalan baru, 2) pola perekrutan fasilitator tanpa diadakannya seleksi dan terkesan asal-asalan tanpa melalui latihan dasar dan pengetahuan tentang pemberdayaan, dimana hal ini menyebabkan ketimpangan dalam melakukan pendampingan karena basic dan belum adanya pengalaman kerja, 3) keterlambatan proses di lapangan karena peran fasilitator kurang optimal dan kurang adanya kesadaran masyarakat yang setelah meminjam uang, yakni tidak mengembalikan uang pinjaman karena mereka beranggapan bahwa dana tersebut merupakan dana bantuan cuma-cuma dari pemerintahan. Hal itu menyebabkan dana ekonomi bergulir tersebut macet.

Program PNPM Mandiri Pedesaan telah resmi berakhir pada tanggal 31 desember 2014. Tidak ada dari kementerian desa mengakhiri kontrak mereka atau memutus kontrak mereka. Kontrak PNPM berakhir karena sudah ada berita acara serah terima (BAST) dari kementerian dalam negeri (kemendagri) dan kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi (kemnedesa PDTT) dengan nomor 100/1694/SJ dan nomor 01/BA/M-DPDTT/IV/2015, bahwa program PNPM Mandiri yang berjalan sejak 2007 telah berakhir pada tanggal 31 desember 2014.

Meskipun demikian dapat diduga bahwa setiap pelaksanaan program pasti menimbulkan kosekuensi-kosekuensi, baik sesuai dengan apa yang diharapkan

sebelumnya maupun yang tidak sesuai dengan harapan. Untuk mengetahui kosekuensi-kosekuensi yang timbul akibat pelaksanaan program PNPM Mandiri Pedesaan di desa Lewopulo khususnya, maka perlu dilakukan penelitian evaluasi. Dalam studi evaluasi ini penulis meneliti pada tahap hasil atau dampak dari program PNPM Mandiri Pedesaan, karena studi evaluasi mempunyai arti penting untuk menilai keberhasilan dari suatu program atau suatu kegiatan yang telah dilaksanakan.

Berdasarkan latar belakang pemikiran diatas penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul **“Evaluasi Dampak Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM MPd) Di Desa Lewopulo Kecamatan Witihama Kabupaten Flores Timur”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang permasalahan diatas, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

Bagaimana dampak dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan yang dilaksanakan didesa Lewopulo Kecamatan Witihama Kabupaten Flores Timur.

1.3 Tujuan

1. Untuk mengetahui apa saja Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan yang telah dilaksanakan dan yang belum terlaksanakan di Desa Lewopulo Kecamatan Witihama Kabupaten Flores Timur

2. Untuk mengetahui dampak dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan yang dilaksanakan di Desa Lewopulo Kecamatan Witihama Kabupaten Flores Timur
3. Untuk mengetahui tanggapan masyarakat tentang pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan di Desa Lewopulo Kecamatan Witihama Kabupaten Flores Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis
 - a. Bagi masyarakat dapat mengetahui apa itu evaluasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan
 - b. Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang diteliti oleh penulis
2. Secara praktis
 - a. Hasil penelitian dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan program pemberdayaan masyarakat
 - b. Bagi masyarakat dapat mengetahui tentang proses, hasil, manfaat dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat.